



Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto Sebut untuk Atasi Stunting dan Sampah

Kota Jogja Terima BKK Dana Keistimewaan Rp 41 Miliar

Tahun Anggaran (TA) 2026 ini Pemda DIY mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp 312 miliar. BKK tersebut disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota serta kalurahan/kelurahan di seluruh DIY.

KETUA Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, kebijakan alokasi BKK diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis wilayah. Sekaligus menjawab persoalan mendesak di masyarakat. "Dana keistimewaan melalui skema BKK ini diharapkan mampu memperkuat layanan publik di tingkat daerah, terutama menyangkut isu strategis seperti penanganan stunting dan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta," ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di gedung DPRD DIY, kemarin (6/5). Di samping itu BKK dana keistimewaan dimanfaatkan untuk urusan kebudayaan, pertanian, tata ruang dan kelembagaan. Secara detail Eko menerangkan total anggaran BKK untuk kabupaten/kota se-DIY mencapai Rp 168 miliar atau tepatnya Rp 168.837.291.750. Rinciannya, Kota Yogyakarta memperoleh Rp 41,3 miliar, Kabupaten Bantul Rp 42,4 miliar, Kabupaten Kulon Progo Rp 37,1 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp 26,7 miliar dan Kabupaten Sleman Rp 21,2 miliar. Sedangkan BKK untuk kalurahan (desa) mencapai Rp 143 miliar. Rinciannya Kabupaten Bantul sebesar Rp 29,7 miliar, Kulon Progo Rp 24,3 miliar, Gunungkidul Rp 53,8 miliar dan Kabupaten Sleman Rp 35,4 miliar. Khusus untuk Kota Yogyakarta, Pemda DIY juga mengalokasikan anggaran tematik. Eko menambahkan, Kota Jogja mendapatkan anggaran penanganan stunting sebesar Rp 120 juta per kalurahan. Totalnya untuk 45 kalurahan se-Kota Jogja mencapai Rp 5,4 miliar. Di samping itu, penyelesaian persoalan sampah dialokasikan Rp 65 juta per kalurahan dengan seluruhnya mencapai Rp 2,9 miliar. Dikatakan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana keistimewaan menjadi perhatian serius DPRD DIY. Itu agar pemberian BKK itu tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan program harus transparan dan akuntabel. "Kami di DPRD DIY akan memastikan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Yogyakarta ini. Dalam kesempatan itu,



PROBLEM SERIUS: Dua orang petugas kebersihan tengah mendorong tempat sampah di kawasan Alun-Alun Utara Keraton Jogja. Masalah sampah dan stunting mendapatkan dukungan penanganan melalui BKK dana keistimewaan. Foto bawah, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto memberikan penjelasan alokasi BKK Dana Keistimewaan 2026 di gedung DPRD DIY, kemarin (6/5).

BKK Kalurahan	
Kabupaten	Jumlah Rp20
Bantul	24.999.500.000
Kulon Progo	24.500.000.000
Gunungkidul	53.800.000.000
Sleman	35.412.791.750
TOTAL	143.712.291.750
TOTAL KESELURUHAN: Rp 312.249.291.750	



alumni Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM ini kembali mengingatkan, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci penting. Itu bertujuan agar program-program yang dibiayai dengan dana keistimewaan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, alokasi BKK itu bisa efektif membantu mengatasi berbagai persoalan mendesak di masyarakat. (kus/zl)

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta: Jl. Malioboro 54 Yogyakarta 55213 Telp.: (0274) 512688, 560293, 565622. Fax: (0274) 580692. Email: setwan@dprd-diy.go.id

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005